

Research Articles

**From Silence to Voice: Collective Memory and Representation
of Victims of the May 1998 Tragedy in Surakarta**

Nur Cahya Mulianggi

Universitas Sebelas Maret

E-mail: nurcahyamulianggiie@student.uns.ac.id

Reka Maya Najwa

Universitas Sebelas Maret

E-mail: rekamayaa@student.uns.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aimmah: Social Sciences Journal

Received : September 5, 2025

Revised : September 16, 2025

Accepted : October 20, 2025

Available online : November 27, 2025

How to Cite: Nur Cahya Mulianggi, & Reka Maya Najwa. (2025). From Silence to Voice: Collective Memory and Representation of Victims of the May 1998 Tragedy in Surakarta. *Aimmah: Social Sciences Journal*, 2(1), 10–19. <https://doi.org/10.63738/aimmah.v2i1.23>

Abstract

The May 1998 riots were a historical juncture demonstrating systematic discrimination against Chinese people, which had been constructed and legitimized through the forced assimilation policy during the New Order era. The economic crisis and political instability at the time were mere sparks; the root of the problem lay in social construction, deliberately created to position ethnic Chinese as scapegoats. This research explicitly rejects the blaming narrative against the Chinese community as a source of conflict and underscores how ethnicity has been politicized to protect powerful interests. This study employed qualitative research related to literature review and critical discourse analysis. The findings show that discrimination extends beyond physical violence and looting to repression of cultural expression, inequality in legal structures, and state neglect of the human rights of minorities. Therefore, post-riot recovery must be directed not only at upholding justice but also at restoring interethnic relations and eliminating discriminatory practices in social policy and culture. This research emphasizes the urgency of national reconciliation that truly acknowledges the victims' experiences and ensures that similar tragedies do not recur.

Keywords: Structural Discrimination, Politicization of Ethnicity, Chinese-Indonesians, Social Reconciliation, May 1998 Tragedy.

Dari Sunyi ke Suara: Memori Kolektif dan Representasi Korban Tragedi Mei 1998 di Surakarta

Abstrak

Kerusuhan Mei 1998 merupakan titik sejarah yang menunjukkan diskriminasi sistematis terhadap masyarakat Tionghoa, yang dikonstruksi dan dilegitimasi melalui kebijakan asimilasi paksa pada masa Orde Baru. Krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik pada saat itu hanyalah pemicunya; Akar persoalannya terletak pada konstruksi sosial yang sengaja dibuat untuk menjadikan etnis Tionghoa sebagai kambing hitam. Penelitian ini secara eksplisit menolak narasi menyalahkan komunitas Tionghoa sebagai sumber konflik dan menggarisbawahi bagaimana etnisitas dipolitisasi demi melindungi kepentingan kekuasaan. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian kualitatif yang berkaitan dengan kajian pustaka dan analisis wacana kritis. Hasil temuan menunjukkan bahwa bentuk diskriminasi tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik dan penjarahan, tetapi juga mencakup represi terhadap ekspresi budaya, ketidaksetaraan dalam struktur hukum, serta pengabaian negara terhadap hak-hak kemanusiaan dari kelompok minoritas. Oleh karena itu, pemulihan pasca-kerusuhan harus diarahkan tidak hanya pada penegakan keadilan, tetapi juga Pemulihan hubungan antaretnis dan penghapusan dilakukan secara diskriminatif dalam kebijakan maupun budaya sosial. Penelitian ini menegaskan urgensi rekonsiliasi nasional yang benar-benar mengakui pengalaman korban dan menjamin bahwa tragedi serupa tidak terulang.

Kata Kunci: Diskriminasi Struktural, Politisasi Etnis, Tionghoa Indonesia, Rekonsiliasi Sosial, Tragedi Mei 1998.

PENDAHULUAN

Kerusuhan yang terjadi di Kota Solo pada Mei 1998 tidak muncul tanpa alasan, melainkan merupakan hasil dari praktik diskriminasi yang telah berlangsung lama sejak era Orde Baru. Pada masa itu, pemerintah menciptakan sebuah identitas nasional yang mengabaikan ekspresi etnis tertentu, terutama Tionghoa, dengan menerapkan berbagai larangan pada budaya dan mengurangi ruang publik bagi mereka. Kebijakan-kebijakan ini membuat kelompok Tionghoa menjadi target kebencian ketika terjadi krisis ekonomi. Dalam situasi ini, kelompok Tionghoa menjadi korban dari pengalihan isu yang dilakukan pemerintah demi mempertahankan kekuasaannya.

Penelitian ini secara ilmiah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa tidak hanya bisa dilihat sebagai akibat dari dominasi ekonomi atau stereotip sosial, tetapi juga sebagai bentuk terorganisir dari rasisme yang didukung oleh struktur kekuasaan. Kekacauan sosial yang melanda Solo menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan setara kepada semua warga negara, sambil membiarkan prasangka etnis tumbuh menjadi masalah kekerasan.

Urgensi akademis dari penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh kerusuhan, terutama terkait trauma kolektif, hilangnya kepercayaan antar etnis, dan narasi yang terus menyalahkan para korban. Penelitian ini memberikan perspektif kritis mengenai peran negara dan ideologi etnis dalam tragedi tersebut, diharapkan mampu menjadi acuan untuk menjalin rekonsiliasi sosial yang lebih terbuka dan mengejar keadilan untuk para penyintas. Konflik yang berakar dari kesenjangan tersebut masih terjadi di Kota Surakarta dan tidak ada pihak yang dapat meredakan keadaan. Berbagai insiden konflik muncul karena rasa cemburu warga asli Surakarta terhadap kelompok etnis yang lebih kaya. Ketegangan ini berasal dari keinginan

mayoritas untuk menyingkirkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi. Dalam waktu singkat, emosional masyarakat Surakarta mudah terbakar, menyebabkan kekerasan seperti penjarahan dan pembakaran aset milik warga etnis.

Menurut analisis yang dilakukan oleh Kartodirdjo, kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa merupakan bagian gelap dalam sejarah sosial Indonesia yang dimulai sejak awal abad ke-20. Puncak dari pola diskriminasi yang berulang ini muncul dalam Tragedi Mei 1998. Konflik etnis ini tidak hanya berhenti pada ketegangan sosial tetapi berkembang menjadi tindakan massa yang agresif, berupa perusakan properti, penjarahan, serta kekerasan fisik dan seksual yang terutama menargetkan komunitas minoritas Tionghoa.

Faktor-faktor ini menyebabkan munculnya sentimen rasial yang luas dan kuat, berkontribusi pada eskalasi kerusuhan. Kerusuhan Mei 1998 muncul dari interaksi yang rumit antara krisis ekonomi yang parah, ketidakstabilan politik, kemunduran dalam penegakan hukum, dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim Orde Baru. Proses erosi legitimasi pemerintahan Soeharto terjadi secara bertahap akibat penyalahgunaan kekuasaan yang berkepanjangan, sehingga krisis moneter mempercepat kejatuhannya.

Sejak awal tahun 1998, Surakarta menjadi pusat gerakan reformasi dengan peningkatan signifikan dalam aksi mahasiswa. Ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan semakin memperburuk kondisi sosial, terutama setelah pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan harga barang-barang penting seperti BBM, listrik, dan transportasi. Kebijakan ini memperbesar tekanan publik dan berfungsi sebagai pemicu yang membuat ketegangan meningkat di berbagai wilayah.

Dalam pengertian yang lain, Mei 1998 seharusnya dianggap sebagai titik klimaks dari masalah-masalah struktural yang ada dalam negara Indonesia. Hal ini menggabungkan aspek politik seperti otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan dengan ketidakadilan ekonomi serta rasisme yang diakui oleh masyarakat dan institusi. Dalam situasi ini, masyarakat Tionghoa dijadikan sebagai sasaran atau korban, yang secara terencana menjadi target untuk kekerasan rasial guna menutupi ketidakberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan sejarah seperti yang tercantum dalam dokumen asli yang digunakan. Pendekatan sejarah dipilih untuk meneliti faktor-faktor dan latar belakang yang menyebabkan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta melalui analisis kritis dari berbagai bukti informasi mengenai peristiwa di masa lalu. Metode yang digunakan terbagi menjadi empat langkah sistematis yang saling berhubungan.

Langkah pertama disebut heuristik, yaitu mengumpulkan dan mengklasifikasikan sumber-sumber sejarah yang relevan, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen asli, laporan peristiwa, serta kesaksian dari individu yang terlibat secara langsung, sementara sumber sekunder termasuk literatur akademis, arsip media yang relevan, dan publikasi ilmiah yang memberikan analisis lebih lanjut tentang kejadian tersebut.

Langkah kedua adalah kritik sumber, yang melibatkan pemeriksaan keaslian dan penilaian tingkat kepercayaan sumber untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak terdistorsi, tidak bias, atau tidak mengandung kesalahan informasi. Proses ini dilakukan dengan penilaian eksternal untuk menguji otentisitas fisik dokumen dan penilaian internal untuk memeriksa validitas dan konsistensi informasi sejarah.

Langkah ketiga adalah interpretasi, di mana peneliti menganalisis data yang telah lolos kritik sumber dengan pendekatan analitis dan perspektif teori sosial-politik. Dalam langkah ini, peneliti mengevaluasi hubungan sebab-akibat antara berbagai faktor yang menjadi latar belakang kerusuhan, termasuk kebijakan Orde Baru, ketimpangan sosial ekonomi, dan pertumbuhan radikalisme identitas yang berpengaruh terhadap hubungan antar etnis di Surakarta.

Langkah terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil analisis ke dalam narasi ilmiah secara kronologis dan sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peristiwa tersebut. Narasi yang dihasilkan tidak hanya menyampaikan fakta-fakta sejarah, tetapi juga menawarkan analisis kritis mengenai dampak sosial dan politik dari kerusuhan.

Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini berupaya memberikan rekonstruksi yang objektif dan bernilai akademis tentang Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta, yang merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis menyeluruh ini memberikan pandangan mendalam tentang berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi etnis yang terjadi selama peristiwa Tragedi Mei 1998, dengan penekanan pada konteks yang lebih luas. Data yang dihimpun dari laporan resmi, arsip media, serta penelitian akademik ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan, seperti yang tercatat oleh Komnas HAM, adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang serius, secara sistematis menargetkan kelompok minoritas dan menyoroti kegagalan negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga struktural, yang mendapat dukungan dari kebijakan asimilasi paksa pada masa Orde Baru dan diperkuat oleh narasi media yang bermuatan bias dan stigma, menjadikan masyarakat etnis Tionghoa sebagai sasaran pengalihan perhatian dari krisis ekonomi dan politik yang ada saat itu. Oleh karena itu, pengumpulan hasil ini berperan sebagai dasar penting untuk memahami sumber ketidakadilan dan ketegangan sosial yang telah terakumulasi, yang kemudian mencapai puncaknya dalam peristiwa kekerasan massal pada tahun 1998.

Tabel 1. Literature Review

No	Nama Sumber/Tahun	Subjek	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Laporan Komnas HAM (Terdahulu)	Pelanggaran HAM berat yang menyasar minoritas etnis (Tragedi Mei 1998)	Analisis data & investigasi pelanggaran HAM	Tragedi Mei 1998 merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang secara khusus menyasar kelompok minoritas. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan berbasis etnis, penyerangan terhadap perempuan, dan penghilangan rasa aman. Pelanggaran ini

From Silence to Voice: Collective Memory and Representation of Victims of the May 1998 Tragedy in Surakarta

Nur Cahya Mulianggi, Reka Maya Najwa

				merupakan serangan terhadap hak-hak dasar warga negara, dan negara gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Ketiadaan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku serta lemahnya tanggung jawab negara terhadap korban menegaskan bahwa diskriminasi telah berakar hingga ke sistem hukum dan birokrasi.
2	Arsip Media (Terdahulu)	Peran media massa pada masa Tragedi Mei 1998	Analisis wacana media	Media massa turut memperkuat diskriminasi melalui narasi berita yang bias dan stigmatis. Narasi-narasi ini memperkuat pandangan negatif terhadap etnis Tionghoa, yang sering digambarkan sebagai simbol keserakahan ekonomi atau ketidakterlibatan sosial. Pemberitaan seperti ini mengaburkan fakta kekerasan dan memperkuat opini publik yang diskriminatif. Di Solo, media lokal dan nasional memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi publik yang berujung pada meningkatnya ketegangan etnis.
3	Penelitian Akademik (Terdahulu)	Konstruksi identitas etnis dan diskriminasi struktural	Studi pustaka dan analisis teori sosial	Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga bersifat struktural dan simbolik. Diskriminasi ini telah berakar sejak masa kolonial dan semakin

From Silence to Voice: Collective Memory and Representation of Victims of the May 1998 Tragedy in Surakarta

Nur Cahya Mulianggi, Reka Maya Najwa

				dilembagakan pada era Orde Baru. Peristiwa di Solo mencerminkan bagaimana identitas etnis digunakan sebagai alat politik untuk menyalurkan frustrasi sosial masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi. Minimnya perlindungan negara terhadap warga Tionghoa menegaskan adanya bentuk ketidakadilan struktural yang dilegitimasi oleh wacana nasionalisme eksklusif.
4	Penelitian Akademik (Terdahulu)	Kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa	Analisis historis/struktural	Diskriminasi politik tidak dapat dilepaskan dari kebijakan eksklusif rezim Orde Baru yang menekan ekspresi etnis dan budaya non-pribumi. Contoh politik asimilasi paksa termasuk larangan penggunaan bahasa Mandarin, pembatasan perayaan Imlek, dan kewajiban mengganti nama Tionghoa. Saat krisis ekonomi, sentimen anti-Tionghoa dibiarkan berkembang sebagai strategi pengalihan isu dari kegagalan ekonomi dan korupsi politik, menjadikan masyarakat Tionghoa sebagai kambing hitam.
5	Penelitian Akademik (Terdahulu)	Posisi ekonomi etnis Tionghoa dan stereotip sosial	Analisis ekonomi/sosiologis	Posisi etnis Tionghoa yang dominan pada sektor perdagangan dan bisnis kecil menengah telah lama menjadi sumber kecemburuan sosial. Stereotip bahwa mereka "menguasai

				ekonomi" merupakan narasi berbahaya yang mudah dieksploitasi untuk memicu konflik horizontal pada masa krisis, seperti tahun 1998. Keterlibatan mereka dalam ekonomi sering kali merupakan warisan struktur kolonial yang menempatkan mereka sebagai perantara, yang meninggalkan jejak ketimpangan sosial hingga era modern.
--	--	--	--	---

Kejadian kerusuhan pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 di Indonesia adalah hasil dari berbagai masalah kompleks yang menumpuk selama akhir masa pemerintahan Orde Baru. Krisis keuangan yang melanda Asia menyebabkan nilai tukar rupiah merosot tajam, yang berujung pada penurunan ekonomi negara. Situasi ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan meningkat, serta memperparah kesenjangan sosial yang sudah ada. Ketidakpuasan publik terhadap kondisi negara yang memburuk juga memunculkan kembali perasaan perbedaan etnis.

Di sisi lain, rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada Presiden Soeharto. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 menjadi simbol dari ketidakpuasan sosial yang sudah lama terpendam oleh otoritarianisme Orde Baru. Insiden penembakan terhadap mahasiswa memicu kekacauan.

Di tengah situasi sosial yang rumit itu, kebijakan diskriminatif pemerintah sejak awal Orde Baru berperan penting dalam menumbuhkan stigma negatif terhadap etnis Tionghoa. Melalui Inpres No. 14 Tahun 1967 dan regulasi-regulasi yang diturunkan, aktivitas budaya dan keagamaan Tionghoa dilarang dengan sangat ketat. Identitas mereka harus berasimilasi, dan sering kali mereka menghadapi penolakan dalam menggunakan hak-hak sipil seperti pencatatan pernikahan, pencatatan kelahiran, dan akses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa bukan hanya masalah sosial, tetapi juga telah menjadi bagian dari kebijakan negara.

Sejarah Surakarta sebagai tempat terjadinya konflik berulang juga menunjukkan bahwa ketegangan antar kelompok telah muncul jauh sebelum tahun 1998. Sejarah pemilu memberikan gambaran tentang dinamika ideologis dan perebutan kekuasaan yang memengaruhi hubungan antar warga. Kerusuhan pada tanggal 19 November 1980, yang disebabkan oleh insiden antara pemuda Tionghoa dan pelajar Jawa, berkembang menjadi sentimen rasial yang menyebabkan kerusakan pada toko-toko milik etnis Tionghoa. Saat itu, pemerintah berusaha menekan gerakan pemuda dan mahasiswa dengan kebijakan politik yang keras, tetapi mereka tidak menangani masalah sosial yang mendasarinya.

Dengan kata lain, Surakarta menyimpan memori mendalam tentang konflik etnis yang tidak pernah benar-benar diselesaikan dan bisa meletus kembali ketika ada pemicu krisis. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 memperburuk kondisi masyarakat. Penurunan drastis nilai rupiah menyebabkan stagflasi serta kenaikan harga barang pokok dan

hilangnya stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ini, etnis Tionghoa sering kali dituduh sebagai pengendali ekonomi dan dijadikan sasaran untuk menyalahkan keadaan negara. Narasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat, terutama kepada mereka yang paling merasakan dampak krisis.

Di kota Surakarta, kerusuhan yang terjadi pada tanggal 14 hingga 15 Mei 1998 menyebabkan kerusakan besar pada gedung-gedung komersial, fasilitas umum, dan infrastruktur kota. Semua aktivitas ekonomi terhenti, pusat perbelanjaan ditutup, dan warga hanya bisa bergantung pada pasar tradisional meskipun harga barang kebutuhan dasar naik dengan drastis. Kerugian material diperkirakan lebih dari Rp 457 miliar. Selain kehilangan ekonomi, terdapat setidaknya 19 korban jiwa yang meninggal dengan cara tragis karena terjebak di dalam gedung yang dibakar oleh massa.

Peristiwa ini meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat Tionghoa. Ketakutan yang dirasakan secara kolektif menyebabkan banyak orang mengungsi ke daerah lain dan juga ke luar negeri. Sampai kini, beberapa penyintas masih merasakan trauma ketika berada di keramaian atau ketika memori kekerasan tersebut muncul kembali dalam berita. Trauma ini tidak hanya menggoyahkan rasa percaya diri dan rasa aman, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat mayoritas. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan semakin memperburuk kondisi mental para korban. Ketidakpastian mengenai keadilan membuat para penyintas merasa bahwa negara tidak hadir untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga. Dampak ini menjelma menjadi kebingungan identitas dan perasaan tidak diakui dalam sistem negara tempat mereka lahir dan tinggal.

KESIMPULAN

Kerusuhan yang terjadi di Surakarta pada Mei 1998 adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang muncul akibat kombinasi dari krisis ekonomi nasional, ketidakadilan sosial yang mendalam, serta kebijakan diskriminatif dari Orde Baru, yang secara sistematis meminggirkan etnis Tionghoa. Puncak dari kerusuhan ini terjadi pada 14-15 Mei 1998 dan menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan serta hak dasar kepada semua warga tanpa memperhatikan latar belakang etnis.

Peristiwa ini jelas telah menyebabkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Bentuk-bentuknya termasuk kekerasan fisik, pembakaran, pencurian, serta kekerasan seksual yang ditujukan pada kelompok-kelompok rentan, khususnya perempuan etnis Tionghoa. Konsekuensi dari tragedi ini tidak hanya berujung pada kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur kota, melainkan juga meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan, ketakutan kolektif, dan memecah hubungan sosial antara etnis Tionghoa dan kelompok mayoritas.

Lebih lanjut, tidak dilakukannya proses hukum dan kurangnya pengakuan dari negara terhadap para korban menunjukkan bahwa ketidakadilan masih ada dan belum ditangani dengan baik sampai sekarang. Oleh karena itu, rekonstruksi sejarah Tragedi Mei 1998 bukan hanya merupakan upaya untuk mendokumentasikan peristiwa itu, tetapi juga bagian dari usaha untuk memulihkan martabat, hak, serta keadilan bagi para korban.

SARAN

Sebagai langkah untuk menjamin hak asasi manusia dan pelaksanaan keadilan transisi, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Negara harus secara resmi dan jelas mengakui Tragedi Mei 1998 sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk mengungkapkan kebenaran sejarah lewat penyelidikan independen dan berbasis perspektif korban.

Pemulihan hak-hak korban harus menjadi prioritas, yang meliputi:

1. Pemulihan psikologis dalam jangka panjang,
2. Kompensasi atas kerugian ekonomi,
3. Pemulihan akses ke pekerjaan dan kelanjutan usaha.
4. Jaminan keamanan dan perlindungan sosial.

Penegakan hukum yang tanpa impunitas diperlukan agar para pelaku kekerasan, baik yang terlibat langsung maupun yang terlibat secara struktural, bisa dimintai pertanggungjawaban melalui sistem peradilan yang adil dan transparan. Pendidikan mengenai hak asasi manusia dan keberagaman budaya perlu diperkuat dalam program sekolah, museum sejarah, dan kampanye publik, untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi, empati, dan integrasi sosial di antara berbagai etnis. Penting untuk membangun ruang dialog dan proses rekonsiliasi di tingkat lokal, terutama di daerah yang pernah mengalami konflik, seperti Surakarta, guna memulihkan hubungan sosial dan mengurangi prasangka etnis yang telah ada.

Pemerintah harus menjamin dukungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan akses ke layanan hukum, kesehatan reproduksi, dan penanganan trauma yang sesuai sebagai bagian dari keadilan gender dalam proses pemulihan setelah konflik. Dengan langkah-langkah ini, pemenuhan hak asasi manusia bagi korban Tragedi Mei 1998 tidak hanya dipahami sebagai penyelesaian masalah yang lalu, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masa depan bangsa yang lebih adil, inklusif, dan terhindar dari diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Himawan, E. M. (2020). Memahami dinamika psikologis individu yang turut terlibat dalam kerusuhan massa Mei 1998: Sebuah kerangka psikologis. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 7(1), 108–125. [tautan mencurigakan telah dihapus]
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 riots in Indonesia: Civilians and their untold memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. [Abstrak & Akses Jurnal](#)
- Hutahaean, I. E. P. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petukangan Jakarta Tahun 1998–2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1), 27–33. [Unduh PDF \(Journal UNNES\)](#)
- Jurdi, S. (2012). Dinamika Politik Kaum Muda Indonesia: Dialektika Politik Nasional dan Lokal. *Sosiologi Reflektif*, 7(2), 167–187. [Akses Jurnal \(UIN Sunan Kalijaga\)](#)
- Noviyanti, D., Puji, R. P. N., & Hartanto, W. (2019). Gerakan Mahasiswa (Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998). *Criksetra: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 8(1), 10–20. [Akses Jurnal \(UNY\)](#)
- Oktaviany, R., Wardani, M. C., & Risti, S. (2019). Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban. *Jurnal Penelitian & Pengukuran Psikologi*, 8(1), 38–47. [Unduh PDF \(Jurnal UNJ\)](#)
- Putri, K. D., & Sugianto, D. (2020). Memahami makna pengampunan pada korban peristiwa 1998. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 127–138. [Abstrak & Akses Jurnal \(UNAIR\)](#)

From Silence to Voice: Collective Memory and Representation of Victims of the May 1998 Tragedy in Surakarta

Nur Cahya Mulianggi, Reka Maya Najwa

- Salim, M. H., & Ramdhon, M. (2020). Dinamika Konflik Kerusuhan Mei 1998 di Kota Surakarta Melalui Perspektif Korban. *Jurnal Online Daulayat dan Sosial Community (JODASC)*, 1(1), 69–85. [Unduh PDF \(Jurnal UNS\)](#)
- Sinuhaji, A. (2017). Trauma lama, solidaritas baru: Publik makin waspada melawan provokasi anti-Tionghoa saat gejolak politik. *The Conversation*. [Baca Artikel \(The Conversation\)](#)
- Winarnita, M., Sastro, M., & Nisa, F. (2020). The intergenerational transmission of trauma in Chinese Indonesian families following the 1998 riots. *Journal of Psychological Issues in Organizational Culture*. [Abstrak & Akses Jurnal \(Wiley\)](#)